

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Demokrasi menjadi hal yang menarik untuk dibahas di Indonesia karena Indonesia menganut sistem demokrasi. Hal tersebut tertulis pada pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa “kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang – undang”. Samuel Huntington menjelaskan bahwa saat ini Indonesia masuk kedalam tahapan gelombang demokrasi ketiga, dimana Indonesia masuk kedalam babak baru, yaitu rezim reformasi. Banyak perubahan yang terjadi pada sistem politik di Indonesia, yaitu perubahan konsentrasi kekuasaan sentralistik menjadi desentralistik. Akibat dari desentralisasi itulah, maka lahir Undang – Undang No. 25 Tahun 1999 dan kemudian diperbaharui melalui Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa kepala daerah dan DPRD ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintah di daerah¹. Dalam rangka menjalankan roda pemerintahan di tiap daerah, maka perlu dipilih seorang kepala daerah untuk menjalankan amanat sesuai dengan asas desentralisasi, hal tersebut dapat dilaksanakan dengan cara proses demokratisasi daerah melalui Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung sesuai dengan asas desentralisasi. Untuk menunjang Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis,

¹ Hidayat, Syarif. 2011. *Reformasi Setengah Matang, Jakarta : Teraju* (Mizan Group).

maka dibuat Dasar hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia yaitu Undang – Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pemilihan kepala daerah juga sebagai media masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya untuk memilih calon-calon kepala daerah terbaik sesuai harapan masyarakat. Setiap calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah memiliki tujuan untuk memenangkan pemilihan yang diikuti. Untuk memenangkan kompetisi atau persaingan tersebut, semua kandidat tentunya memiliki strategi yang digunakan untuk menang. Strategi kampanye menjadi penting dalam kemenangan sebuah pemilihan, baik pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu *event* demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat, Pada tahun 2005 Pemilu Kepala Daerah mulai dilakukan secara langsung, mengingat sebelumnya Kepala Daerah dipilih oleh DPRD melalui demokrasi perwakilan. Partisipasi politik dalam pemilu bersifat *voluntary*, hal tersebut yang mengharuskan para politikus mampu membujuk rakyat melalui komunikasi politik yang informatif, edukatif, persuasif secara efektif². Pada tahun 2018 Pemilihan Kepala Daerah diadakan serentak di seluruh di Indonesia dengan dasar hukum PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada gelombang pertama diikuti oleh 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Salah satu daerah yang mengikuti atau menggelar pemilihan kepala secara serentak yaitu Provinsi Jawa Tengah.

² Arifin, Anwar. 2001. *Komunikasi Politik :Filsafat – Paradigma – Teori – Tujuan – Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, Yogyakarta :Graha Ilmu. (hal 229)

Membahas tentang Pilkada maka juga harus membahas tentang partai politik. Partai politik lahir sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran Nasional, kesadaran akan satu bangsa. Kesadaran bahwa manusia hidup secara berkelompok dan tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kemunculan partai politik salah satunya merupakan alat pemersatu bangsa karena mengingat banyaknya suku dan budaya di Indonesia, sehingga dengan adanya partai politik tidak ada lagi diskriminasi antar suku dan saling ego dengan menganggap sukunya yang lebih baik lalu berjuang dengan memilih jalan dengan sendirinya. Kesadaran bersatunya bermacam-macam aneka ragam kebudayaan menjadi satu yang utuh dan serasi. Kesadaran akan adanya kesamaan hak bagi seluruh lapisan masyarakat dalam bidang politik juga menunjang lahirnya sebuah Partai politik.

Dari aspek historis, Jawa Tengah merupakan “kandang banteng” sudah menjadi simbol bagi PDIP, sehingga PDIP mampu memenangkan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Pada Pilgub Jateng 2008 PDIP mengusung Bibit – Rustri berhasil menang meyakinkan dengan memperoleh suara sebesar 6.004.261 atau 43,44% dari total pemilih. Kemudian pada Pilgub Jateng 2013 PDIP mengusung Ganjar – Heru dan kembali menang meyakinkan dengan memperoleh suara sebesar 6.962.417 atau 48,82% dari total pemilih. Terakhir pada Pilgub Jateng 2018 PDIP mencalonkan Ganjar – Yasin dan kembali menang dengan perolehan suara sebesar 10.362.694 suara atau 58,78% dari total pemilih.

Sedangkan pada pemilihan umum legislatif Jawa Tengah, PDIP selalu menang meyakinkan dan berhasil menguasai Jawa Tengah dari tahun 1999 hingga 2014. Pada pemilu Jawa Tengah tahun 1999 PDIP berhasil memperoleh prosentase suara sebesar 37%. Kemudian pada Pemilu Jawa Tengah tahun 2004 PDIP kembali menang dan

memperoleh prosentase suara sebesar 31%. Selanjutnya pada Pemilu 2009 PDIP kembali menjadi partai pemenang dengan memperoleh prosentase suara sebesar 23%. Terakhir pada Pemilu Jawa Tengah tahun 2014 PDIP kembali tampil sebagai partai pemenang pemilu dengan jumlah prosentase suara sebesar 27%.

Dalam mencalonkan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018, PDIP memiliki modal kursi di legislatif sebesar 27 kursi atau 27% dari total kursi yang ada di DPRD Jawa Tengah. Hal tersebut menunjukkan bahwa PDIP bisa mengusung calon kepala daerah tanpa berkoalisi dengan partai manapun karena sudah memiliki jumlah kursi di DPRD lebih dari 20%. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 40 ayat 1 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dimana Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan³.

Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Tengah tahun 2018 diikuti oleh 2 pasangan calon yang semuanya diusung oleh partai politik koalisi, yaitu :

1. Ganjar Pranowo – Taj Yasin Maimoen diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Golongan Karya (Golkar).
2. Sudirman Said – Ida Fauziyah diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

³ Pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Melihat dari sejarah, Sejak tahun 1999, Jawa Tengah selalu didominasi oleh PDIP dalam pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah. PDIP selalu menang diatas angin karena strategi basis masa yang dimiliki PDIP telah mengakar kuat pada hati masyarakat Jawa Tengah, Maka dari itu Jawa Tengah kemudian dikenal sebagai “kandang banteng“. Hal tersebut dilakukan PDIP berdasarkan konsep disiplin *marketing*, dimana “menempatkan” seseorang kandidat atau sebuah partai dalam pikiran para pemilih yang kemudian disebut *positioning*⁴. Dalam teori ekuitas merek partai, dukungan dari dewan pimpinan pusat kepada tiap daerah (kota maupun provinsi) akan sangat berpengaruh pada cabang – cabang partai, dan akan menjadi basis masa yang semu apabila dewan pimpinan pusat tidak memperhatikan basis masanya⁵. Hal tersebut dipraktekan langsung oleh PDIP pada setiap pemilihan legislatif dan pada pemilihan kepala daerah sehingga selalu menjadi partai pemenang di Provinsi Jawa Tengah.

Tetapi perlu diperhatikan bahwa kemenangan PDIP pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 tidak sesuai dengan target partai, dimana DPD PDIP Jawa Tengah menargetkan menang sebesar 71,6% tetapi pada realisasinya hingga perhitungan suara selesai pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin hanya menang dengan perolehan suara sebesar 58,78%. DPD PDIP Jawa Tengah sebelumnya telah melakukan survey internal partai dengan menggandeng Pandawa Research dengan target kemenangan minimal 61,6% dan target kemenangan paling tinggi sebesar 71,6%. Kalkulasi ruang data DPD PDIP Jawa Tengah memaparkan, pasangan Ganjar – Yasin harusnya dapat menang dengan perolehan suara diatas 60% karena Ganjar

⁴ Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing : Strategi Memenangkan Pemilu*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. (hal 137)

⁵ Hafied Cangara. 2009. *Komunikasi Politik: konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

– Yasin juga diusung oleh partai lain, seperti : PPP, NasDem, Golkar dan Demokrat. Karena DPD PDIP Jawa Tengah optimis dengan hasil kemenangan pada Pilgub Jawa Tengah pada tahun 2008 dan 2013 dimana pasangan yang diusung oleh PDIP selalu menang dengan perolehan suara diatas 40% walaupun tanpa koalisi. Ruang data DPD PDIP juga menjelaskan bahwa PDIP dapat menang diatas 60% di kandang Sudirman Said, yaitu di Kabupaten Brebes. Hal tersebut berdasar pada perhitungan 5 tahun terakhir Pemilihan Bupati dan Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Brebes yang selalu dimenangi oleh PDIP. Tetapi pada kenyataannya, perolehan suara Ganjar – Yasin di Brebes justru jauh dari prediksi dimana Ganjar – Yasin hanya mendapat perolehan suara sebesar 324,997 (39,5%), sedangkan pasangan Sudirman – Ida memperoleh suara sebesar 497.170 (60,5%).

Berdasarkan fakta – fakta diatas, ada beberapa hal yang menarik untuk diteliti pada Pilgub Jawa Tengah 2018, pertama karena PDIP pada Pilgub 2018 akhirnya melakukan koalisi dengan partai lain, mengingat pada pilgub 2008 dan 2013 PDIP tidak pernah melakukan koalisi dengan partai lain serta selalu mencalonkan Gubernur dan Wakil Gubernur dari kader internal partai. Kedua, pada Pilgub Jawa Tengah 2018 PDIP tidak menang secara maksimal mengingat pada Pilgub Jateng sebelumnya PDIP tanpa koalisi selalu menang secara meyakinkan dan lebih dari target partai, sedangkan pada Pilgub Jateng 2018 PDIP melakukan koalisi dengan banyak partai tetapi hanya menang 58% tidak sesuai dengan target minimal yang di tetapkan partai sebesar 60%. Berdasarkan latar belakang di atas, Bagaimanakah strategi Pemenangan yang diterapkan PDIP pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 untuk memenangkan Ganjar Pranowo – Taj Yasin Maimoen?

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Strategi pemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Realisasi Target Pemenangan Ganjar Pranowo dengan Taj Yasin Maimoen di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis Strategi Pemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Realisasi Target Pemenangan Ganjar Pranowo – Taj Yasin Maimoen Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori strategi pemenangan dalam studi ilmu politik, yang terkhusus pada strategi pemenangan calon kepala daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai sumber pelengkap informasi bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal ini yang berhubungan dengan strategi pemenangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin dalam pemilihan Gubernur - Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023 serta Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian sejenis lainnya.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Strategi Politik

Strategi berasal dari bahasa Yunani “*strategia*”, yang berarti kepemimpinan atas pasukan atau seni memimpin pasukan. Kata *strategia* bersumber dari kata *strategos* yang berkembang dari kata *stratos* (tentara) dan kata *agein* (memimpin). Kata strategi pada mulanya sangat akrab di kalangan militer, secara etimologis berasal dari kata majemuk bahasa Yunani, yaitu *Strategos* yang berarti pasukan dan *agein* yang berarti memimpin atau *Strategia* yang berarti kepemimpinan atas pasukan, seni memimpin pasukan⁶. Kemudian istilah strategi itu meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang komunikasi, politik dan komunikasi politik. Hal tersebut penting dalam upaya memenangkan kompetisi dalam pemilihan umum, dan dalam pengambilan keputusan politik lainnya.

Tipe strategi menurut Koteen⁷, antara lain yaitu:

1. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi) Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, nilai, tujuan, nilai-nilai, inisiatif-inisiatif strategi yang pembahasannya ini diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa;
2. *Program Strategy* (Strategi Program) Strategi ini memberikan perhatian implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu,

⁶ Schröder, Peter. 2003. *Strategi Politik*, Jakarta: Frederich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit.

⁷ *ibid*

apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi;

3. *Resourch Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya)

Strategi ini memusatkan perhatian kepada maksimalisasi pemanfaatan sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, dan teknologi;

4. *Institutional Strategy* (Strategi Institusi) Fokus dari strategi

institusional adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategis. Pada dasarnya, strategi pemenangan mencakup beberapa tipe strategi, diantaranya strategi organisasi yang dalam hal ini adalah organisasi tim pemenangan, yang di dalamnya mencakup perumusan misi, nilai, tujuan, nilai-nilai, inisiatif-inisiatif strategi, serta strategi program karena strategi ini memberikan perhatian implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu.

Strategi politik adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang teknik, taktik dan cara seseorang yang digunakan dalam mewujudkan cita – cita dalam mendapatkan kekuasaan. Strategi politik⁸ adalah strategi yang digunakan untuk meralisasikan cita-cita politik. Strategi politik biasa digunakan dalam usaha merebut atau mempertahankan kekuasaan, terutama saat pemilihan umum. Strategi ini berkaitan dengan strategi kampanye, dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara meraih hasil (suara)

⁸ Schröder, Peter. 2003. *Strategi Politik*, Jakarta: Frederich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit.

yang maksimal di pemilu, guna mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat mengarah pada perubahan masyarakat.

Strategi dalam pengertian sempit maupun luas terdiri dari tiga unsur, yaitu tujuan (*ends*), sarana (*means*), dan cara (*ways*). Dengan demikian strategi adalah cara yang digunakan dengan menggunakan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan⁹.

Pada dasarnya strategi politik adalah strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politis yang terbentuk dalam pikiran para pemilih menjadi orientasi perilaku yang akan mengarahkan pemilih untuk memilih partai politik atau konstantan tertentu. Makna inilah yang menjadi output penting strategi politik yang menentukan pihak, pihak mana yang akan dicoblos para pemilih¹⁰. Tujuan akhir dalam strategi politik adalah untuk membawa calon kepala daerah yang didukung oleh strategi politiknya menduduki jabatan kepala daerah yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh masyarakat.

Zetter¹¹ menjelaskan bagaimana strategi memenangkan Pilkada, Pemilu dan Pilpres. Secara garis besar, strategi dibagi menjadi dua bagian, yaitu : strategi perang udara dan strategi perang darat. Strategi perang udara berkaitan dengan strategi mengumpulkan informasi, propaganda, dan menggalang dana. Sebaliknya, strategi perang darat berkaitan dengan terjun langsung dalam

⁹ Nasution, Noviantika. 2006. *Bobolnya Kandang Banteng: Sebuah Otokritik*. (Jakarta: Penerbit Suara Bebas. hal 43.

¹⁰ Adman Nursal. 2004, *Political Marketing: Strategi memenangkan pemilu, sebuah pendekatan baru kampanye pemilihan DPR, DPD, Presiden*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, h. 23.

¹¹ Zetter, Lionel. 2008. *Strategi Memenangkan PILKADA PEMILU dan PILPRES*. PT Ina Publikatama, Jakarta.

masyarakat untuk mengumpulkan basis masa, mobilisasi masa untuk memenangkan pemilu secara efisien dan efektif.

Strategi perang udara dalam pemilu dapat dilakukan dengan cara perang telepon, pertempuran kecil, pembunuhan, kantor pusat, dan penggalangan dana.

1. Strategi perang telepon adalah strategi politik untuk mengumpulkan beragam informasi mengenai lawan dan menyerang lawan dengan berbagai spekulasi untuk menunjukkan bahwa kesiapan dalam menghadapi pemilihan umum, hal tersebut bertujuan untuk menjaga moral.
2. Strategi pertemuan kecil adalah pertempuran politik pada tingkat lokal seperti pemilihan bupati, walikota, dan DPRD.
3. Strategi pembunuhan politik adalah persekongkolan antar media dan partai oposisi mendorong pengunduran diri menteri dalam tubuh pemerintahan. Hal tersebut bertujuan untuk “menguliti” kementrian.
4. Strategi politik kantor pusat, dibagi menjadi dua, yaitu staf dan gedung. Staf adalah orang yang bekerja dan loyal pada suatu partai politik. Staf dibagi menjadi beberapa divisi, yaitu : divisi penggalangan dana yang bertugas mengumpulkan uang untuk kegiatan administrasi partai. Divisi keuangan bertugas untuk mengurus pembayaran staf, peralatan dan kebutuhan jasa. Divisi keanggotaan bertugas untuk merkrut anggota baru. Divisi kebijakan atau riset bertugas untuk mengktitisi dan menganalisis kebijaka disuatu daerah. Kemudian strategi gedung adalah strategi yang bertujuan sebagai suatu

tempat tempat partai politik dalam menyusun teknis serta taktis politik dalam menghadapi lawannya.

5. Strategi penggalangan dana dapat dilakukan melalui broadcast/siaran (siaran partai politik dan siaran pemilu partai), konferensi partai dan iklan. Siaran partai umumnya ditayangkan setelah event utama politik, tujuannya untuk meyakinkan publik dalam memperoleh dukungan. Sedangkan siaran pemilu adalah siaran yang dilakukan selama periode pemilu.

Konferensi partai dilakukan guna mengumpulkan basis masa yang terdaftar serta melakukan koordinasi terkait dengan agenda politik selanjutnya. Ada empat alasan partai politik menyelenggarakan konferensi, yaitu : untuk menggalang dana, menampilkan para pemimpin partai dan tokoh senior partai, mendongkrak moral anggota partai, memformulasikan kebijakan partai. Iklan menjadi salah satu alasan mengapa partai politik harus menggalang dana dalam jumlah yang cukup besar untuk bertarung dalam pemilu. Keuntungan melakukan kampanye melalui iklan adalah partai dapat mencapai sasaran kelompok tertentu yang akan dijadikannya sebagai basis masa.

Selanjutnya strategi politik perang darat adalah strategi yang digunakan untuk menetapkan sikap dalam kontestasi secara langsung, yakni dapat dilakukan melalui :

1. menetapkan pilihan,
2. pengumpulan informasi,
3. proses seleksi,

4. pemilihan dewan,
5. komunikasi politik,
6. jadwal pemilihan
7. pengeluaran untuk kampanye
8. sumbangan
9. kelayakan
10. menyamakan seragam,
11. memamsang selebaran,
12. metode pemungutan suara,
13. alamat pemilih
14. menggalang dukungan, kampanye,
15. kampanye pengalihan,
16. daerah pemilih sasaran,
17. hari pencoblosan dan
18. penghitungan suara

Firmanzah mengklasifikasikan bentuk – bentuk strategi¹², yaitu :

1. Strategi politik pesaing adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui strategi apa yang akan digunakan oleh lawan. Hal ini diartikan sebagai semua cara, metode, dan teknik yang digunakan oleh musuh untuk mencapai tujuan – tujuan politik yang mereka rumuskan. Strategi ini perlu dicermati karena strategi ini tidak hanya menentukan

¹² Firmanzah. 2007. *Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. hal.244.

kemenangan politik pesaing, tetapi juga mempengaruhi perolehan suara kita.

2. Strategi komunikasi politik adalah suatu analisis media massa milik kandidat atau suatu partai terhadap masyarakat. Komunikasi intensif yang dilakukan oleh kandidat atau partai politik menandakan suatu agresivitas pesaing dalam menanamkan suatu image tertentu dalam benak masyarakat. Analisis secara masif terkait strategi komunikasi politik ini tidak hanya menyangkut isi, melainkan juga sebagai wadah saluran media informasi dan komunikasi. Strategi komunikasi politik ini bertujuan untuk tidak membiarkan lawan politik mendominasi suatu media politik.
3. Strategi lobi politik adalah strategi yang dilakukan oleh kandidat atau partai politik untuk membangun *bergaining power* dan kekuatan, yang biasanya dilakukan secara beraliansi dengan partai maupun kandidat lain. Strategi lobi politik juga harus mempertimbangkan kedekatan ideologis dengan partai maupun kandidat lain yang akan diajak beraliansi agar image partai politik tetap terjaga.
4. Strategi isu politik Strategi adalah strategi yang dilakukan secara terus menerus untuk memonitor cara pesaing dalam membangun isu politik. Strategi isu politik digunakan untuk mencari isu lain yang belum terekspos oleh lawan, sehingga nantinya suatu yang *genuine* dari suatu partai politik dapat terekam dalam benak masyarakat.

1.5.2 Pemilihan Kepala Daerah

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat ini memberikan ruang partisipasi yang luas untuk memilih dan mennetukan kepemimpinan politik di tingkat daerah. Selain itu, pemilihan kepala daerah ditujukan untuk mendukung otonomi daerah. Karena pemimpin yang pilih secara langsung oleh masyarakat akan lebih paham akan kondisi yang ada di daerah tersebut. Sejak pasca reformasi peraturan tentang pemilihan kepala daerah secara langsung memang selalu diperbaiki atau diamandemen. Undang – undang Dasar No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah menjadi dasar peraturan bagi Pemilihan Kepala Daerah.

Asshiddiqie¹³, menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah langsung merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Sebab, sebgus apapun suatu negara yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selalu dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tidak. Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya.

Selain memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam memilih kepala daerahnya secara langsung, pemilih kepala daerah juga memerkuat otonomi daerah. Selanjutnya dalam pelaksanaannya. Pemilihan kepala daerah memiliki

¹³ Asshiddiqie, Jimly. 1994, *Gagasan Kedaulatan dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

tujuan sebagai berikut¹⁴, yaitu : Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat; Legitimasi yang sama antar kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD; Kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD; Mencegah politik uang.

Menurut UU RI Nomor 32 Tahun 2004 pasal (25), tugas dan wewenang serta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Mengajukan Rancangan Perda;
3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan kepala daerah langsung disebut demokratis jika merujuk pada tiga kriteria, yaitu (1) keterbukaan, (2) ketepatan, (3) keefektifan pemilu. Asas yang digunakan dalam pilkada langsung telah dijelaskan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada pasal

¹⁴ Abdullah.H Rozali. 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

2, yakni asas Pilkada adalah langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil¹⁵. Asas-asas tersebut dapat dikatakan bahwa pilkada langsung di Indonesia telah menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam rekrutmen pejabat publik atau pejabat politik yang terbuka. Pengertian asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;

b. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti pilkada. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial;

c. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Kemudian dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya;

¹⁵ Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 2

d. Rahasia

Selanjutnya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan dipilihnya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan;

e. Jujur

Lalu dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggaraan pilkada, aparat pemerintah, calon atau peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan;

f. Adil

Pada penyelenggara pilkada, setiap pemilih dan calon atau peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota¹⁶, dijelaskan pada pasal 5 ayat 3 dalam Undang-Undang ini tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yaitu meliputi:

1. Pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;

¹⁶ Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pasal 5 ayat 3.

2. Pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
3. Penelitian persyaratan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
4. Penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota;
5. Pelaksanaan kampanye;
6. Pelaksanaan pemungutan suara;
7. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara;
8. Penetapan calon terpilih;
9. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan;
10. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

1.5.3 Partai Politik

Partai berasal dari bahasa Latin 'partire' yang bermakna membagi. Menurut Prof Miriam Budiardjo¹⁷. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Partai politik kemudian didefinisikan sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya untuk mendapatkan

¹⁷ Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.

keuntungan dari dukungan tersebut¹⁸. Sedangkan Maurice Duverger¹⁹ menjelaskan partai politik sebagai suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan – jabatan publik. Dengan itu, partai politik dapat disimpulkan sebagai kelompok orang yang terorganisasi dan memiliki kesamaan ideologi dan memiliki tujuan untuk memperjuangkan cita – cita bersama.

La paromba dan Weiner (1966)²⁰ mengidentifikasi empat karakteristik dasar yang menjadi ciri khas organisasi partai politik, yaitu :

1. Organisasi jangka panjang. Organisasi partai politik diharapkan dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada. Partai politik bukan sekedar gabungan dari para pendukung yang setia dengan pemimpinnya. Maka dari itu, partai politik dapat berfungsi dengan baik apabila memiliki sistem dan prosedur yang mengatur aktivitas organisasi serta ada mekanisme suksesi yang dapat menjamin keberlangsungan partai politik untuk jangka waktu yang lama.
2. Struktur organisasi. Partai politik dapat menjalankan fungsinya dengan baik apabila didukung oleh struktur organisasi mulai dari tingkat lokal maupun nasional dan ada pola interaksi yang teratur diantara keduanya. Partai politik dilihat sebagai organisasi yang

¹⁸ Firmanzah. 2007. *Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal.66.

¹⁹ Duverger, Maurice. 1972, *Party Politics and Pressure Groups*. Thomas Cromwell. New York

²⁰ *ibid*

meliputi suatu wilayah teritorial serta dikelola secara prosedural dan sistematis. Struktur organisasi partai politik yang sistematis dapat menjamin aliran informasi dari atas kebawah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas fungsi kontrol dan koordinasi.

3. Tujuan berkuasa. Partai politik didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, baik di level lokal maupun nasional.
4. Dukungan publik luas adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan. Partai politik perlu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Karakteristik ini menunjukkan bahwa partai politik harus mampu diterima oleh mayoritas masyarakat serta sanggup memobilisasi sebanyak mungkin elemen masyarakat.

Fungsi dan peran partai politik²¹ secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu peran dan tugas internal organisasi dan tugas eksternal organisasi. Dalam hal internal, organisasi partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Sedangkan fungsi eksternal organisasi partai politik yaitu terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. kehadiran partai politik memiliki tanggung jawab konstitusional, moral dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.

²¹ Firmanzah. *Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hal.69.

Secara lebih detail, partai politik memiliki beberapa peran dan fungsi, yaitu :

1. Rekrutmen dan seleksi pemimpin.

Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Maka diperlukan suatu proses pendidikan formal maupun non-formal yang mampu membentuk jiwa dan karakter pemimpin. Untuk itu, partai politik bertanggung jawab dalam mencetak kader yang berkualitas, melalui pengembangan sistem rekrutmen, seleksi dan kaderisasi politik.

Rekrutmen adalah sistem awal partai politik dalam mendapatkan sumber daya yang baik, kemudian dilanjutkan dengan adanya sistem seleksi yang nantinya akan didapatkan orang – orang yang memiliki kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politik. Setelah merekrut dan menyeleksi, selanjutnya adalah pengkaderan, dimana sistem kaderisasi ini merupakan cara untuk mentransfer pengetahuan politik (sejarah, visi misi, strategi politik, keahlian berpolitik dan keterampilan politik).

2. Program politik dan opini publik.

Program politik didefinisikan sebagai semua program yang terkait dengan semua agenda kerja partai, terkait dengan isu nasional, konstalasi persaingan, dll. Partai politik memilik

tanggung jawab untuk memerhatikan situasi dan kondisi masyarakat, sekaligus mengembangkan solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya. Program politik perlu dikomunikasikan kepada publik sehingga tercipta opini publik tentang suatu permasalahan sosial.

3. Kontrol pemerintah.

Dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah, terdapat dua mekanisme partai politik dalam menyalurkan sikap kritis terhadap pemerintah. Pertama, sikap kritis yang disalurkan dan dicerminkan oleh wakil – wakil partai politik yang terdapat pada lembaga legislatif. Kedua, partai politik dapat menyuarkan analisis dan sikap kritisnya melalui jalur non parlementer, misalnya melalui diskusi dan debat publik tentang kebijakan pemerintah.

4. Integrasi sosial dalam ideologi politik.

Partai politik berfungsi untuk memfasilitasi integrasi kolektif – sosial. Organisasi partai politik harus didesain sedemikian rupa agar tercipta integrasi antar individu dan kelompok masyarakat. Proses integrasi dapat menggunakan dua mekanisme, yaitu : pertama dengan melakukan kontrol internal dengan cara membuat suatu peraturan yang berlaku bagi semua anggota partai, seperti AD/ART dan reward and punishment partai politik. Kedua adalah melalui fungsi koordinasi yang bertujuan

untuk agar adanya keterikatan antara satu individu dan kelompok dengan yang lainnya, sehingga gerak dan aktivitas organisasi partai politik dapat dilakukan secara simultan dan mendapat dukungan dari semua pihak.

5. Edukasi politik.

Partai politik juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang apa itu politik dan bagaimana menyuarakannya. Edukasi politik yang dilakukan partai politik dapat berupa cara berpolitik yang sehat, berkompetisi yang baik dan menghormati peraturan yang telah disepakati bersama. Masyarakat membutuhkan sosok individu yang dianggap dapat memimpin untuk mengarahkan mereka.

Almond²² selanjutnya menjelaskan partai politik memiliki fungsi politik, yaitu :

1. Fungsi representasi, yaitu fungsi partai politik untuk memberikan sarana politik langsung kepada kepentingan yang diwakilinya, misal : petani, buruh, dll.
2. Fungsi konversi, yaitu fungsi partai politik untuk mentransformasi dari apa yang disebut bahan-bahan mentah politik, yaitu : kepentingan dan tuntutan menjadi kebijaksanaan dan keputusan.
3. Fungsi integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi), Sosialisasi adalah proses dimana kumpulan norma – norma sistem politik ditransmisikan kepada orang – orang yang lebih muda. Mobilisasi adalah variasi ekstrem dan sosialisasi, yaitu partai berusaha memasukan secara cepat

²² Almond, Gabriel. 1974. *Comparative Politics Today*. Little, Brown & Co. Boston

sejumlah besar orang yang sebelumnya berada di luar sistem tersebut, juga mereka yang apatis, terasing, tidak tahu menahu, tidak tertarik, takut kedalam sistem itu untuk menanamkan kepentingan dan menjamin dukungan massa. Partisipasi berdiri diantara mobilisasi dan sosialisasi, ini berarti bahwa melalui partai di semua sistem, medium ekspresi kepentingan dan partisipasi dalam pemilihan pemimpin dan kebijaksanaan, terbuka untuk semua pihak.

4. Fungsi persuasi, yaitu kegiatan partai yang dikaitkan dengan pembangunan dan pengajuan usul – usul kebijaksanaan agar memperoleh dukungan seluas mungkin bagi kegiatan – kegiatan tersebut.
5. Fungsi represi, yaitu partai melalui pemerintah atau secara langsung mengenakan sanksi baik kepada anggota maupun bukan anggota, mengendalikan nasib semua asosiasi dan partai lain, serta berusaha menuntut ketaatan dan membentuk pikiran dan loyalitas, anggota dengan cara yang tidak hanya mengizinkan adanya oposisi tetapi juga menghukum pihak oposisi dan pembangkang.
6. Fungsi rekrutmen, yaitu digunakan dalam pengertian yang seluas mungkin untuk menunjukan latihan dan persiapan untuk kepemimpinan terbuka untuk masyarakat, penampilan badan legislatif, pemerintah atau fungsi – fungsi lain oleh anggota partai, dan tentu saja, kompetisi yang baik dalam pemilihan umum.

7. Fungsi membuat pertimbangan, perumusan kebijakan dan kontrol terhadap pemerintah.
8. Fungsi dukungan, yaitu partai tidak hanya mobilisasi dan memerintah, tetapi juga harus menciptakan kondisi – kondisi bagi kelangsungan hidupnya dan kelangsungan sistem dimana partai tersebut beroperasi.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai partai politik atau setiap organisasi terkategori sebagai partai politik, apabila: Pertama, terwujud dalam identitas, dapat berupa nama, bendera dan yang terpenting ideologi yang menjadi dasar nilai bagi pedoman dan aktivitas partai politik; Kedua, ketika sekelompok orang-orang bergabung tentunya bukan sekedar kumpulan biasa, tetapi sebagai

Dalam sistem kepartaian Indonesia yang ada.pada umumnya partai politik dapat digolongkan dalam beberapa kelompok antara lain, pertama aliran nasionalis misalnya partai Demokrat, PDIP, Partai Hanura, Partai Gerindra, dsb. Kedua aliran agama misanya Partai Kebangkitan Bangsa, PAN, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Damai Sejahtera dsb. Ketiga, aliran partai local dimana hanya di khususkan untuk daerah Aceh misalnya Partai Bersatu Aceh (PBA), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA).

Ketiga, keberadaan partai politik diakui memiliki hak oleh sebagian besar masyarakat untuk mengorganisasikan dirinya, sekaligus mengembangkan dirinya dengan berbagai aktivitas. Secara sederhana, partai politik bisa mengatasnamakan kelompok masyarakat tertentu yang merupakan pendukung atau anggota-anggotanya; Keempat, partai politik berupaya mengembangkan aktivitas-aktivitas melalui mekanisme kerja yang mencerminkan pilihan rakyat. Partai politik dalam

berbagai kegiatan, bekerja berdasarkan prinsip representative government atau pemerintah yang mencerminkan pilihan rakyat. Hal ini dimungkinkan oleh keberadaan partai politik yang harus selalu berhubungan dengan rakyat. Dengan posisi seperti ini, partai politik diharuskan mengembangkan mekanisme hubungan yang aspiratif, responsif, dan partisipatif terhadap rakyat terutama pendukungnya sehingga apapun yang menjadi aktivitas politik partai merupakan gambaran suara rakyat; Kelima, aktivitas inti partai politik adalah melakukan seleksi bagi rakyat, baik dari kalangan partai politik yang dipilih sebagai kandidat untuk menduduki jabatan-jabatan publik dalam pemerintahan²³.

Berdasarkan tingkat komitmen parpol terhadap ideologi dan kepentingan, partai politik dapat diklasifikasikan dalam lima jenis²⁴, yaitu :

1. Partai proto, adalah tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti sekarang. Ciri menonjol partai proto adalah perbedaan antar kelompok anggota dengan non anggota. Kemudian masih belum tampak sebagai partai politik modern, tetapi hanya fraksi – fraksi yang dibentuk berdasarkan ideologi dalam masyarakat.
2. Partai kader, adalah perkembangan lebih lanjut dari partai proto dimana ideologi yang dianut masih konservatif ekstrim atau reformisme moderat. Contoh : PSI 1950 -1960.
3. Partai massa, adalah partai yang muncul setelah adanya perluasan hak pilih rakyat, sehingga dianggap sebagai suatu respon politik dan organisasional bagi perluasan hak pilih. Partai massa terbentuk diluar parlemen dengan basis

²³ Budi Suryadi. 2006. *Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia*, IRCiSoD, Yogyakarta, Hal.57.

²⁴ Fadjar, Abdul Mukhti. 2013. *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang, Hal.15.

masa yang luas seperti : buruh, tani, kelompok agama, dll. Tujuannya bukan hanya mencari kemenangan, tetapi juga memberika pendidikan politik bagi masyarakat. Contoh : Masyumi, PNI, PKI.

4. Partai diktatorial, adalah partai yang miri seperti partai masa tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Contoh : PKI.
5. Partai catch-all, adalah gabungan dari partai kader dan partai massa. Tujuan nya adalah untuk memenangkan pemilu dengan cara menawarkan program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku. Contoh : Golkar.

1.6 Operasionalisasi Konsep

konsep harus dapat didefinisikan secara operasional, maka dari itu konsep harus diobservasi dan diukur. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan rujukan empiris tentang temuan di lapangan guna menggambarkan secara tepat konsep dimaksud. Operational konsep bertujuan untuk mencari titik temu antara teori konseptual dengan temuan empirik observasi.

1.6.1 Strategi Politik

Teori strategi politik digunakan oleh pengurus DPC PDIP Jawa Tengah, Tim sukses Ganjar – Yasin serta relawan Ganjar – Yasin untuk menggodok formula strategi politik guna memenangkan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018.

1.6.2 Konsep Strategi Politik

Pemfiguran calon dan komunikasi politik harus dilakukan oleh tim sukses Ganjar – Yasin untuk dapat menarik masa guna memenangkan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018. Pemfiguran PDIP terhadap Ganjar – Yasin perlu dilakukan guna mengenalkan kandidat calon ke publik agar lebih dikenali oleh masyarakat luas. Pemfiguran sendiri adalah salah satu cara untuk menonjolkan identitas seseorang yang berbeda dengan individu lainnya. Kemudian komunikasi politik tetap harus terus berjalan guna mencari pendukung – pendukung dalam pemilihan gubernur. Komunikasi politik bertujuan untuk mencari formula yang tepat dalam melakukan pendekatan – pendekatan kepada basis masa / kelompok tertentu

agar dapat dijadikan sebagai masa solid dalam Pilkada. Selain itu, komunikasi politik juga bertujuan untuk memetakan basis masa terkait siapa saja yang menjadi masa solid, masa mengambang, dan masa pendukung calon lain.

Partai pengusung harus lebih peka melihat konstelasi politik yang dinamis, serta harus dapat mengambil sikap yang menguntungkan bagi partainya. Karena partai politik menjadi kunci kemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah.

1.6.3 Elemen Strategi Politik

Untuk memenagkan kompetisi politik, faktor basis masa dan pendukung menjadi kunci penting dan harus diperhatikan. Kesolidan mesin partai dan antar pendukung partai menjadi harus diutamakan dalam kompetisi politik. Perencanaan strategi yang matang harus dilaksanakan dengan baik karena hal tersebut menjadi titik balik dari kemenangan dalam kompetisis politik, karena semakin matang perancangan strategi politik maka semakin besar pula dukungan yang akan didapatkan. Elemen – elemen yang tergabung dalam strategi politik antara lain :

1. Parati Politik sebagai mesin pemenangan,
2. Tim pemenangan atau tim sukses
3. Tim Penggerak
4. Kader Partai dan Simpatisan Partai
5. Organuisasi masa / komunitas
6. Organisasi sayap

7. Organisasi kepemudaan
8. Tokoh masyarakat

Dalam prakteknya, semua elemen harus bekerjasama dan saling gotong royong, serta taat pada perintah komando agar tidak terjadi miss komunikasi dalam keberjalanannya. Serta loyalitas sangat dituntut dalam keberlangsungannya karena suatu kelompok tidak akan berhasil apabila ada seorang penghianat didalamnya.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Penelitian tentang strategi pemenangan PDIP dalam memenangkan Ganjar pranowo – Taj Yasin dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah 2018 menggunakan metode kualitatif karena melalui pendekatan kualitatif diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna, kenyataan, dan fakta yang relevan²⁵. Penggunaan metode kualitatif membutuhkan kesungguhan dalam pengamatan, empati, abstraksi dan interpretasi melalui *verstehen*, dengan implikasi metodologi : Memusatkan perhatian observasi pada praktik sosial dari fenomena yang terjadi. Menggali lebih dalam berbagai aspek dan informasi para pelaku serta memperhatikan dimensi struktural yang ada dan memanfaatkan semaksimal mungkin triangulasi data²⁶.

²⁵ Basrowi & Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta : Rineka Cipta. (hal 187)

²⁶ *ibid*

Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dikarenakan hal tersebut sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk menggambarkan hasil analisis strategi pemenangan partai demokrasi indonesia perjuangan dan realisasi target pemenangan ganjar pranowo – taj yasin maimoen pada pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur jawa tengah tahun 2018. Ada beberapa syarat umum pada metode deskriptif, yaitu : (1) memusatkan pada pemecahan masalah yang ada pada sekarang (aktual), (2) data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa (analitik)²⁷.

1.7.2 Situs Penelitian

Lokasi penelitian sebagai sasaran pendukung jika dimungkinkan yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis yang meliputi di dalam Provinsi Jawa Tengah dengan mengacu pada instansi Posko pemenangan Ganjar Yasin, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah, dan KPUD Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan nantinya dalam proses penelitian dapat membantu penulis dalam mendapatkan data, baik dari Kader partai maupun dari instansi yang bersangkutan, sehingga dapat memudahkan dalam mendapat data dari para narasumber.

1.7.3 Subjek Penelitian

²⁷ Winarno Surakhmad. 1998, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito (hal 40)

Dalam menentukan informan dalam penelitian ini, penulis menggunakan *purposive sampling* dalam menentukan rujukan narasumber. Penelitian kualitatif ini sangat berkaitan dengan faktor kontekstual, sehingga *purposive sampling* memiliki maksud untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber, maka dari itu tujuan dari *purposive sampling* adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam suatu konteks yang unik.

Moelong²⁸ menjelaskan bahwa *purposive sampling* memiliki ciri – ciri : (1) sampel tidak dapat ditarik terlebih dahulu, (2) pemilihan sample secara berurutan sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk mendapatkan perluasan informasi, (3) sample makin dipilih atas dasar fokus penelitian, (4) pemilihan berakhir apabila sudah terjadi pengulangan.

Narasumber yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini antara lain : Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah, Bambang Wuryanto (Bambang Pacul), Ketua *Timses* Ganjar – Yasin, Bambang Haryanto Baharudin, Pengurus DPD BMI Jawa Tengah, Y. Eko Prasetyo dan Badan Saksi Pemilu Nasional, Mas Andrey.

1.7.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel non random berdasarkan pertimbangan tertentu.

²⁸ Moelong, Lexy J. 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya (hal 224).

Pertimbangan tersebut antara lain karena dianggap sebagai orang yang tahu tentang penelitian yang penulis kerjakan. Sehingga data yang terkumpul nantinya dapat memudahkan penulis dalam mengerjakan penelitiannya.

1.7.5 Sumber Data

Lofland²⁹ menjelaskan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata – kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain – lain. Dalam penelitian ini, Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer³⁰ di dapatkan melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tape, pengambilan foto/film, dimana sumber data utama didapatkan melalui wawancara atau pengamatan berperan serta yang merupakan hasil usaha. Dalam penelitian ini, yang termasuk kedalam klasifikasi data primer adalah hasil wawancara dengan Ketua Tim Pemenangan Ganjar – Yasin, DPD BMI Jawa Tengah dan BSPN PDIP Jawa Tengah.

Sumber data sekunder³¹ adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Data sekunder dapat berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi maupun dokumen resmi. Dari sumber data sekunder, penulis dapat mendapatkan tambahan informasi terkait dengan

²⁹ Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta. (hal 169).

³⁰ Moelong, Lexy J. 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya (hal 159).

³¹ *ibid*

sejarah/riwayat subjek penelitian yang lebih mendetail. Selain itu, data sekunder bisa didapatkan melalui foto/rekaman karena foto/rekaman menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi subjektif. Yang termasuk kedalam data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber laporan resmi KPUD Jawa Tengah.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, seperti : wawancara, dokumentasi, pencarian dokumen dan penelusuran data online.

Wawancara

Menurut Moleong³², wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (pengaju pertanyaan) dan terwawancara (pemberi jawaban). Lincoln dan Guba³³ menjelaskan maksud mengadakan wawancara, antara lain : mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, kebetulan yang dialami masa lalu. Memproyeksikan kebulatan – kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang. Memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain dan memperluas konstruk yang dikembangkan oleh peneliti.

³² Moelong, Lexy J. 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya (hal 186).

³³ Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rineka Cipta. (hal 127).

Penulis menjadikan wawancara sebagai teknik pengumpulan data karena penulis bisa mendapatkan langsung jawaban dari narasumber yang dianggap tau mengenai permasalahan yang sedang diteliti, dengan cara memberikan beberapa pertanyaan terkait garis besar permasalahan yang dihadapi.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan – catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan³⁴. Teknik ini merupakan cara pengumpulan dokumen atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yang merupakan sumber penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud berupa dokumen tertulis yang telah diperoleh dari media cetak dan media elektronik (internet), data statistik, laporan penelitian sebelumnya, tulisan-tulisan ilmiah serta data – data pendukung yang didapatkan melalui instansi terkait.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, prinsip pokok dari penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Secara umum ada tiga pokok persoalan dalam

³⁴ Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rineka Cipta. (hal 158).

analisis data, yaitu : konsep dasar, menemukan tema, dan merumuskan hipotesis kerja³⁵.

Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

³⁵ *ibid.*

Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk bagan, *flowchart*, maupun uraian singkat. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan data dengan menunjukkan teks yang bersifat naratif. Selain itu, untuk menunjang informasi data, penulis juga akan menampilkan penyajian data dengan grafik dan tabel yang berkaitan dengan strategi pemenangan PDIP dalam Pilgub Jawa Tengah 2018 sehingga dapat memudahkan para pembaca.

Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap verifikasi merupakan tahapan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses, sehingga nantinya kesimpulan ini dapat menjawab pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.